

ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP IPM DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2018

Sunani¹

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Zahara Noviandra²

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Arifudin³

Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia

E-mail: ¹sunanikarisah@gmail.com, ²zaharanoviandra360@gmail.com, ³arifudin2000@gmail.com

ABSTRACT

The Human Development Index (HDI) serves as a key indicator in measuring a country's economic progress. However, despite Indonesia's relatively high economic growth, its HDI ranking remains low. To enhance economic development, the government must play an active role by directing expenditure policies across various sectors such as the economy, healthcare, and education. From the perspective of Islamic economics, government spending should be based on principles of justice, balance, and sustainability. This research employs a qualitative descriptive method, utilizing government expenditure data sampled from 2013 to 2018. The analysis reveals that government spending significantly impacts Indonesia's economic development positively. Each increment in government expenditure results in a certain percentage increase in economic growth. Furthermore, the research finds that the composition of government spending also influences economic growth. Government expenditure focused on productive sectors like infrastructure, education, and research and development yields a more positive impact on economic growth compared to expenditure on administrative and consumptive sectors. In the context of Islamic economics, government spending must adhere to Sharia principles, avoiding interest (riba) and practices contrary to Islamic values, while ensuring fair distribution of resources. Consequently, the government can foster an inclusive and sustainable economic climate, supporting the enhancement of the Human Development Index.

Keywords: *HDI, Government Expenditure, Islamic Economy, Islamic Economics, Sharia Principles.*

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator kunci dalam mengukur kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, peringkat IPM masih rendah. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah harus memainkan peran aktif dengan mengarahkan kebijakan pengeluaran pada berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah harus berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengambil sampel data pengeluaran pemerintah dari tahun 2013 hingga 2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Setiap kenaikan satu unit pengeluaran pemerintah menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar persentase tertentu. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa komposisi pengeluaran pemerintah juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang difokuskan pada sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan riset dan pengembangan, memberikan dampak yang lebih positif terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pengeluaran untuk sektor administratif dan konsumtif. Dalam konteks ekonomi Islam, pengeluaran pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, menghindari riba (bunga) dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, serta memastikan distribusi yang adil dari sumber daya.

Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan iklim ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Kata Kunci: IPM, Pengeluaran Pemerintah, Ekonomi Islam, Ekonomi islam, Prinsip Syariah.

INTRODUCTION

Pengeluaran pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara berdasarkan kaidah Islam. Tolak ukur kesejahteraan ekonomi dalam Islam diukur dengan Indeks Pembangunan Insani (IPI) yang mencakup aspek spiritual, intelektual, fisik, dan ekonomi. Semakin tinggi IPI, semakin baik hasil pembangunan ekonomi sesuai syariat Islam.¹

Indikator pembangunan ekonomi dalam Islam mengacu pada kumpulan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja ekonomi suatu negara berdasarkan kaidah Islam. Indikator-indikator ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi pendapatan, kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan berbagai aspek penting lainnya terkait pembangunan ekonomi Islam. Penggunaan indikator pembangunan ekonomi dalam Islam sangat penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi sesuai syariat. Namun, indikator-indikator tersebut tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi dalam Islam, karena masih banyak faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi sesuai syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pembangunan ekonomi yang terencana dengan baik, berkelanjutan, berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah sesuai prinsip-prinsip syariah.²

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dalam Islam karena pemerintah mempunyai kontrol terhadap alokasi dan penggunaan anggaran sesuai kaidah syariah yang bersifat ekspansif atau kontraktif. Dalam beberapa dekade terakhir, pembangunan ekonomi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sesuai syariat Islam. Hal ini tidak terlepas dari peran besar pengeluaran pemerintah dalam mendorong pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Melalui pengeluaran pemerintah, sektor-sektor kunci seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan industri telah diberikan dukungan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang sesuai syariat Islam.³

¹ Chapra, M. Umer. (2000). *the Future of Economics: An Islamic Perspective* Islam & Sains.

² Setiawan, Budi. "Analisis Indikator Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 1 (2020): 45-58.

³ Aziz, A. (2019). Peran Pengeluaran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Islami di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 121-138.

Pembangunan insani atau peningkatan kualitas sumber daya manusia secara spiritual, intelektual, fisik, dan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional sesuai syariat Islam. Keberhasilan pembangunan ini seringkali dilihat dari pencapaian kualitas sumber daya manusia berdasarkan Indeks Pembangunan Insani (IPI) atau Islamic Human Development Index (IHDI). IPI adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, ilmu pengetahuan, pendidikan, standar hidup, dan kepatuhan terhadap syariat untuk semua negara di dunia.⁴

Pembangunan insani dalam Islam adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia sesuai syariah. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, berilmu pengetahuan, memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, serta taat kepada Allah SWT.⁵

Indeks Pembangunan Insani (IPI) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sesuai syariah Islam. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPI dibangun melalui pendekatan empat dimensi dasar, yaitu spiritual, intelektual, fisik, dan ekonomi. Dimensi spiritual diukur dari kepatuhan terhadap syariat Islam. Dimensi intelektual diukur dari pengetahuan dan pendidikan. Dimensi fisik diukur dari kesehatan dan usia panjang. Dimensi ekonomi diukur dari kehidupan layak sesuai syariah Islam.⁶

Dalam versi syariah ini, konsep pembangunan ekonomi dan indikator pembangunan manusia disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Aspek spiritual, kepatuhan terhadap syariat, dan kesesuaian dengan ajaran Islam menjadi poin penting yang dimasukkan dalam pembahasan. Selain itu, istilah-istilah seperti "Indeks Pembangunan Insani (IPI)" dan "Islamic Human Development Index (IHDI)" digunakan untuk menggantikan istilah yang digunakan dalam versi sebelumnya.⁷

METHOD

Dalam menyusun artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode kuantitatif yaitu metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam

⁴ Alamsyah, R., & Syahputra, H. (2021). Pembangunan Insani Berbasis Syariah Islam di Indonesia: Studi Analisis Indeks Pembangunan Insani. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 55-70.

⁵ Wahyudi, A. dan Lestari, R. (2021). "Implementasi Indeks Pembangunan Insani Syariah dalam Kebijakan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 78-94.

⁶ Alamsyah, R. dan Sari, N. (2023). "Indeks Pembangunan Insani Berbasis Syariah: Pendekatan Multi-Dimensi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Islam*, 15(2), 75-90.

⁷ Fauzi, A., & Amin, M. (2023). Indeks Pembangunan Insani (IPI): Sebuah Pendekatan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi dan Manusia. *Al-Muqaddimah: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(2), 123-140.

pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur.⁸ Penulis juga menggunakan metode deskriptif yaitu meneliti dengan kajian berbagai jurnal yang berkaitan dengan Analisis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.⁹ Penulis ini memilah masalah dengan mengumpulkan dan memilah data yang sebenarnya. Berbagai sumber yang menjelaskan dianalisis dan disortir secara berurutan, setelah itu ditarik kesimpulan yang obyektif dalam penelitian ini.

RESULTS AND DISCUSSION

Analisis pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kajian yang sangat penting dalam perspektif Islam. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk memakmurkan kehidupan dan membangun peradaban yang sejahtera. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pembangunan manusia menjadi sangat krusial.¹⁰ Dalam QS. Al-Qashash : [28] 77, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَبْتِغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi." (QS. Al-Qashash: 77)

Menurut penafsiran yang dilakukan oleh at-Tabari (310 H) dalam kitabnya Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayi al-Quran, kalimat "wa la tansa naṣībaka minad dunya" memiliki dua penafsiran berdasarkan riwayat-riwayat yang dikutip oleh at-Tabari. Penafsiran pertama menyatakan bahwa semua yang dilakukan di dunia harus ditujukan untuk akhirat, seperti ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Penafsiran ini didasarkan pada 11 dari 15 riwayat yang disebutkan oleh at-Tabari. Sedangkan penafsiran kedua mengartikan ayat ini sebagai dorongan untuk bekerja demi kehidupan di dunia, berdasarkan empat dari 15 riwayat. Berdasarkan pentakwilan at-Tabari ini, banyak pemahaman pada masa itu yang menganggap bahwa kehidupan di dunia terutama untuk beribadah kepada Allah.¹¹

Pembangunan berkelanjutan, dalam konteks ini, adalah cara untuk mencapai kebahagiaan duniawi tanpa mengabaikan kewajiban agama. Dalam konteks pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan IPM, terdapat

⁸ Handoko, D., & Widjaja, S. (2021). Pengolahan Data Kuantitatif dengan SPSS: Panduan Praktis. Jurnal Teknologi dan Informatika, 12(1), 34-48.

⁹ Anwar, S., & Setiawan, R. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 21(2), 145-160.

¹⁰ Naqvi, S. N. H. (2003). Perspektif Pembangunan Manusia dalam Islam. Penerbit Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹¹ Al-Rifqi, A. Z. K. (2023). *Tafsir Kontekstual QS. Al-Qasas [28]: 77 Tentang Keseimbangan Hidup Sebagai Indikator Kebahagiaan Manusia (Penerapan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

beberapa sektor utama yang perlu diperhatikan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah: 224).

Hadits ini berasal dari Hadits Ibnu Majah, nomor hadits 224. Bab: 1, Kitab Muqaddimah, Bab: Fadhu al-Ulama' wal-Hathh 'ala Talab al-Ilm. Hadits ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, pada Musnad Al-Anshariyyin, bagian dari Musnad Al-Anshariyyin yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.¹²

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, seperti pembangunan sekolah, penyediaan guru yang kompeten, dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan IPM. Selain pendidikan, sektor kesehatan juga memegang peranan penting dalam pembangunan manusia. Dalam Islam, menjaga kesehatan merupakan suatu kewajiban. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

"Sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu." (HR. Al-Bukhari: 5199)

Hadits ini berasal dari hadits Al-bukhari 5199, dalam Kitab: Sahih Al-Bukhari pada Bab "Hak badan yang harus dipenuhi" (باب حَقِّ الْجَسَدِ عَلَيْكَ). Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadits ini diriwayatkan dalam konteks diskusi tentang kewajiban memenuhi hak-hak tubuh, termasuk istirahat, makan, dan kebutuhan dasar lainnya.¹³

Pada hadits tersebut, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengeluaran pemerintah untuk membangun dan memelihara rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, serta program-program promosi kesehatan akan berkontribusi terhadap peningkatan harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perlindungan sosial juga merupakan aspek penting dalam pembangunan manusia yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam QS. Al-Isra': [17] 26. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۗ

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros". (QS. Al-Isra': 26).

¹² Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 133-144.

¹³ Fitriah, M. (2016). Kajian Al-Quran Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 105-126.

Dalam Tafsir Al-Mishbah, pemahaman tentang kata “تَبَدَّرَ” (pemborosan/menghambur-hamburkan) merujuk pada pengeluaran yang tidak sesuai atau tidak tepat dengan kebutuhan dan hak yang benar. Jika seseorang mengeluarkan atau membelanjakan seluruh hartanya untuk tujuan yang baik atau benar (haq), maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pemborosan. Pengeluaran yang sesuai dengan hak dan tujuan yang benar, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar RA (menyerahkan seluruh hartanya untuk berjihad) dan Utsman RA (membelanjakan separuh hartanya), dipandang sebagai bentuk ketakwaan dan kebaikan, bukan pemborosan. Pemborosan lebih terkait dengan tindakan berlebihan atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, seperti membasuh wajah lebih dari tiga kali saat berwudhu. Prinsip utama dalam Islam adalah menggunakan harta dengan bijaksana dan sesuai dengan tuntunan agama.¹⁴

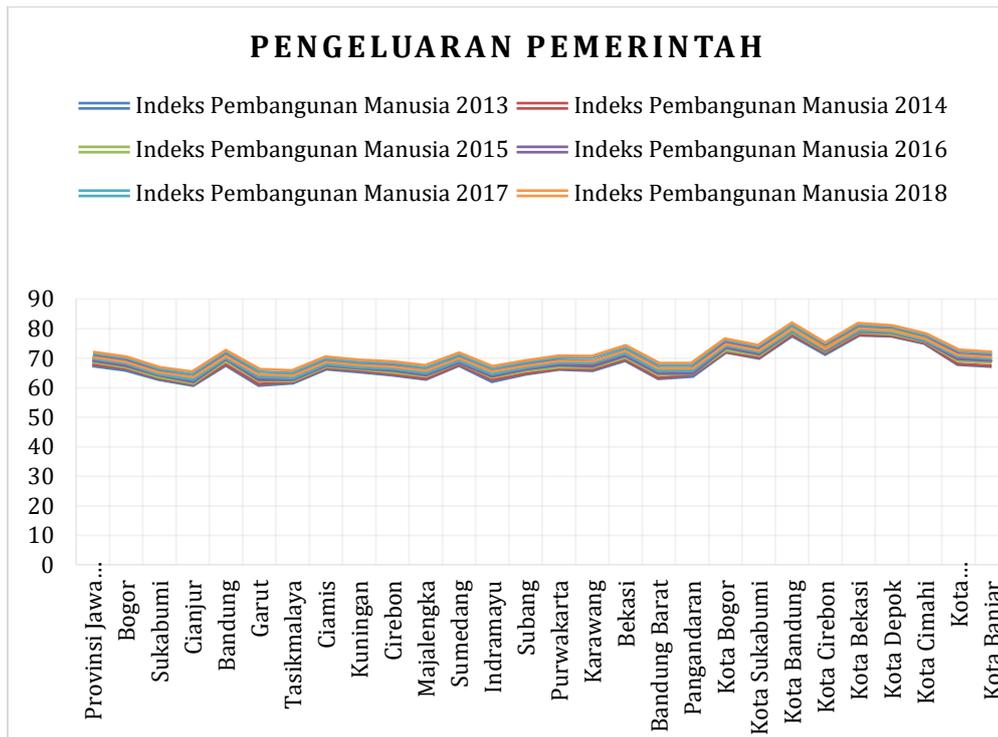
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan untuk membantu dan melindungi kaum miskin dan mereka yang membutuhkan. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program perlindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah, prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi. Pengeluaran pemerintah harus dikelola dengan baik dan diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.¹⁵

Pada tahun 2013-2018 Jumlah tingkat pengeluaran pemerintah mengalami naik turun yaitu memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2013 sebesar 68,25% mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 68,08%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 69,50%. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar 70,05%. Tahun 2017 naik lagi sebesar 70,69%. Dan naik kembali tahun 2018 mencapai 71,30%

¹⁴ Ulirrahmi, F. (2024). Analisis Konsep Efisiensi Ekonomi Dalam Islam: Kajian Terhadap QS. Al-Isra Ayat 26-29. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 13-23.

¹⁵ Aguspriyanto, M. A. (2022, Januari 1). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMA)*, 3(1), 4-7.

Grafik 1 IPM



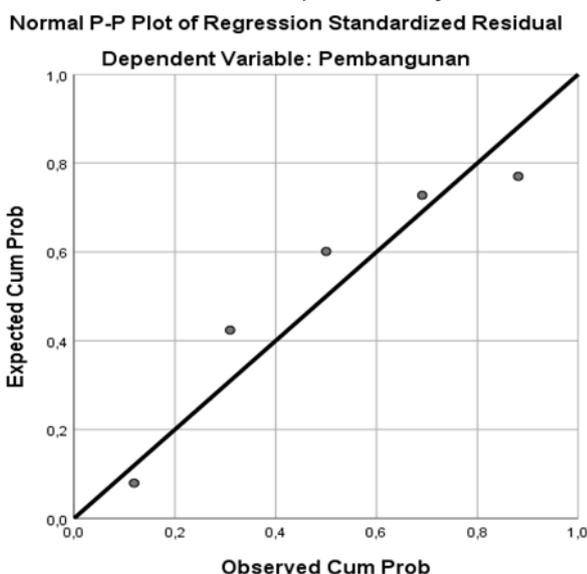
Sumber: Data Olahan

Grafik 1 diatas menunjukan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Dari tahun 2013-2018 IPM selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Asumsi Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Probably Plot



Sumber: Data Olahan

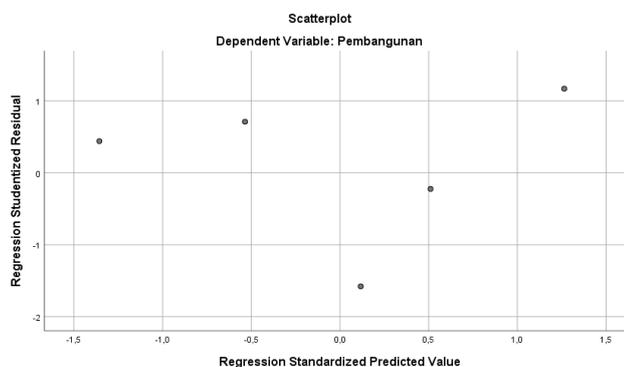
Analisis tersebut menunjukkan bahwa data pada tabel P-Plot mengikuti garis diagonal, menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi secara normal. Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk memperhatikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam analisis statistik seperti ini.

Dalam ekonomi syariah, distribusi yang adil dan berkelanjutan dari sumber daya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ketika menganalisis distribusi residual, penting untuk memastikan bahwa distribusi tersebut memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jika distribusi residual tidak normal, hal itu dapat menimbulkan kekhawatiran terkait dengan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya.¹⁶

Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, penggunaan metode analisis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah juga dapat menjadi pertimbangan. Misalnya, penggunaan metode analisis yang memperhitungkan risiko dan keuntungan secara adil serta memastikan bahwa hasil analisis tidak melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, dalam melakukan analisis seperti ini, penting untuk tidak hanya memperhatikan aspek teknisnya, tetapi juga mempertimbangkan implikasi dari hasil analisis tersebut dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas (Scatterplot)



Sumber: Data Olahan

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan scatter plot, dimana titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Dalam perspektif ekonomi syariah, analisis dan interpretasi data harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Prinsip-

¹⁶ Hafidhuddin, D. (2003). Analisis Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 55-72.

prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan menghindari spekulasi dan ketidakpastian (gharar) harus dijunjung tinggi dalam melakukan analisis data.¹⁷ Dalam konteks ini, menghindari heteroskedastisitas dalam model regresi merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa estimasi parameter yang diperoleh adalah valid dan tidak bias. Dengan demikian, hasil analisis dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan ekonomi syariah, yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam ekonomi syariah juga menuntut kita untuk memastikan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari model regresi terpenuhi sebelum mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis¹⁸. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan salah satu pihak atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis data dan interpretasi hasil, seorang ekonom Muslim harus senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, kehati-hatian, dan menghindari spekulasi serta ketidakpastian yang berlebihan. Dengan demikian, hasil analisis yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan ekonomi syariah.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,124 ^a	,015	-,313	,36531

Sumber: Data Olahan

Nilai koefisien determinasi (R Square) yang tercantum dalam tabel Model Summary adalah 0,015. Dengan kata lain, 15% pada indeks pembangunan manusia. Sisanya, sebanyak 85% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

¹⁸ Hengki, H. (2021). *Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko non performing financing (npf) dalam pembiayaan murabahah di bmt mujahidin tumbang sangai* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).

Analisis Regresi Linier Berganda

1. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar struktur modal yang mempengaruhi oleh variabel bebasnya dilihat dari nilai Adjusted R Square.¹⁹

Tabel 5 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,703 ^a	,494	,368	,91263
a. Predictors: (Constant), Pengeluaran				
b. Dependent Variable: Pembangunan				

Sumber: Data SPSS yang diolah

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang ditampilkan dapat dilihat koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,368 artinya semakin R Square positif dan mendekati 1 maka semakin kuat. Artinya Hal ini berarti ada Variabel X kuat yang mempengaruhi Variabel Y.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian uji F ini bertujuan untuk mengetahui keseluruhan variabel bebas atau independen,²⁰ apakah memiliki pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 6 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,258	1	3,258	3,912	,119 ^b
	Residual	3,332	4	,833		
	Total	6,590	5			
a. Dependent Variable: Pembangunan						
b. Predictors: (Constant), Pengeluaran.						

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh hasil F-Statistik sebesar 3,912 > 2,98 dengan signfikasi sebesar 0,119. karena probabilitasnya signifikan lebih besar dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan yang berarti dapat dikatakan bahwa PDRB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan tidak berpengaruh sama sekali terhadap IPM.

¹⁹ Ardianto, A., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh Variabel X1, X2, dan X3 Terhadap Variabel Y dalam Model Regresi Linier Berganda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45-56.

²⁰ Amalia, E. (2010). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 1(2), 105-120.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menentukan pengaruh masing-masing variabel independen /bebas terhadap variabel dependen /terikat menggunakan uji t. Hasil nilai t dari pengujian analisis regresi terdapat pada lampiran berikut:

Tabel 3.4 Uji T

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance
1	(Constant)	-2,682	14,898		-,180	,869	
	Pengeluaran	,044	,205	,124	,216	,843	1,000

Sumber: Data Olahan

Hasil perhitungan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) statistik diatas menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan dalam model signifikan tidak mempengaruhi PDRB, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan menunjukkan tingkat signifikan sebesar 1,000 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan nilai t hitung dengan tabel diketahui bahwa variabel PDRB nilai t hitung (0,869) lebih besar dari t tabel (0,180) dan variabel Pengeluaran Pemerintah nilai t lebih kecil dari nilai t tabel (0,216), dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PDRB dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Jika Indeks Pembangunan naik satu satuan maka tingkat pengeluaran akan turun sebesar 2,682. Berdasarkan uji parsial (uji t) Nilai Sig = 0,843 > $\alpha=0,05$ maka indeks pembangunan manusia (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengeluaran pemerintah.
2. Jika pembangunan naik satu satuan maka tingkat pengengeluaran akan turun sebesar 0,044 dengan asumsi indeks pembangunan manusia dan pengeluaran konstan. Berdasarkan uji parsial (uji t) Nilai Sig = 0,005 < $\alpha=0,05$ maka pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengeluaran pemerintah.

CONCLUSION

Perspektif syariah dalam pengelolaan sumber daya dan pengeluaran negara untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dapat dijabarkan bahwa Pengeluaran negara harus didasarkan pada prinsip maslahat, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan. Pengelolaan sumber daya dan pengeluaran negara dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, transparan, dan bebas dari pemborosan

(israf) serta korupsi (ghulul). Pemerintah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial, agar pengeluaran negara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, termasuk pengawasan dan evaluasi pengeluaran negara, guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Pengeluaran negara difokuskan pada aspek-aspek penting dalam indeks pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan sumber daya, pemerintah memastikan tidak ada eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sesuai konsep mizan dalam Islam. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah tersebut, diharapkan tercapai peningkatan indeks pembangunan manusia yang signifikan, sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

REFERENCES

- (BPS), B. P. (2020, Februari 28). *Statistik Indonesia, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan*. Retrieved Desember 13, 2023, from bps.go.id:
- (BPS), B. P. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat 2010-2017*. Retrieved Desember 13, 2023, from bps.go.id:
- (BPS), B. P. (2023). *Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah), 2013-2015*. Retrieved Desember 13, 2023, from bps.go.id:
- (BPS), B. P. (2023). *Realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah), 2016-2018*. Retrieved Desember 13, 2023, from bps.go.id:
- Aguspriyanto, M. A. (2022, Januari 1). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi-Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi Mahasiswa (JEKMA)*, 3(1), 4-7.
- Hanum, F. D., Sugianto, & S. M. (2022, Mei). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi provinsi Jawa Barat. *Sibatik Journal*, 1(6), 945. Retrieved Desember 13, 2023
- Kemenkeu. (2018, Desember 31). *analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks pembangunan Manusia melalui Pendapatan Domestik Regional bruto Indonesia*. Retrieved Desember 13, 2023, from Kemenkeu.go.id:

- Mardiyani, R. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan dan Sektor Kesehatan terhadap (IPM) di Kabupaten Kampar Tahun 2008-2017. *Universitas Islam Riau*.
- Marlina, L. (2022, Maret). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Ekonomis : Jurnal Of Economics and Business*, 6(1), 88-90.
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia DI Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 1(1), 40. Retrieved Desember 13, 2023
- Rosdiana. (2022, januari 10). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Perkotaan Jawa Barat Periode 2014-2018. *Repository Unoversitas Siliwangi*, 5.
- Widiaty, E., & Nugroho, A. P. (2020). Pertumbuhan ekonomi indonesia perspektif ekonomi islam: peran inflasi, pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri dan pembiayaan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 223-238.
- Iqbal, M., & Mawaddah, H. F. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Metro Tahun 2007-2017 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 1(1), 19-40.
- ALFIANDO, Y. (2020). Analisis Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (2011-2018) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Chapra, M. Umer. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islam & Sains.
- Al-Qardawi, Yusuf. (1999). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terjemahan dari Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. Jakarta: Rabbani Press.
- Aziz, A. (2019). Peran Pengeluaran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Islami di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 121-138.
- Hafidhuddin, D. (2003). Analisis Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(2), 55-72.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspektif Pembangunan Manusia dalam Islam*. Penerbit Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Alamsyah, R., & Syahputra, H. (2021). Pembangunan Insani Berbasis Syariat Islam di Indonesia: Studi Analisis Indeks Pembangunan Insani. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 55-70.

- Wahyudi, A. dan Lestari, R. (2021). "Implementasi Indeks Pembangunan Insani Syariah dalam Kebijakan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 78-94.
- Setiawan, Budi. "Analisis Indikator Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 21, no. 1 (2020): 45-58.
- Amalia, E. (2010). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 1(2), 105-120.
- Fauzi, A., & Amin, M. (2023). Indeks Pembangunan Insani (IPI): Sebuah Pendekatan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi dan Manusia. *Al-Muqaddimah: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 15(2), 123-140.
- Handoko, D., & Widjaja, S. (2021). Pengolahan Data Kuantitatif dengan SPSS: Panduan Praktis. *Jurnal Teknologi dan Informatika*, 12(1), 34-48.
- Anwar, S., & Setiawan, R. (2020). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 145-160.
- Al-Rifqi, A. Z. K. (2023). *Tafsir Kontekstual QS. Al-Qasas [28]: 77 Tentang Keseimbangan Hidup Sebagai Indikator Kebahagiaan Manusia (Penerapan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)* (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Darani, N. P. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Riset Agama*, 1(1), 133-144.
- Fitriah, M. (2016). Kajian Al-Quran Dan Hadits Tentang Kesehatan Jasmani Dan Ruhani. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 105-126.
- Ulirrahmi, F. (2024). Analisis Konsep Efisiensi Ekonomi Dalam Islam: Kajian Terhadap QS. Al-Isra Ayat 26-29. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(1), 13-23.
- Hengki, H. (2021). *Penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko non performing financing (npf) dalam pembiayaan murabahah di bmt mujahidin tumbang sangai* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Ardianto, A., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh Variabel X1, X2, dan X3 Terhadap Variabel Y dalam Model Regresi Linier Berganda. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 45-56.
- Amalia, E. (2010). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 1(2), 105-120.